

**ALUR PENERBITAN IZIN KETINGGIAN GEDUNG/BANGUNAN
DI DALAM KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)**

Alur proses Penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar Alur Penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan
di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Penjelasan lebih terperinci penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Akun Aplikasi SISKOPI

Pemohon membuat surat permohonan akun aplikasi SISKOPI yang ditandatangani oleh pemohon (Format pada lampiran 1), dengan mencantumkan :

- a. Nama Perusahaan;
- b. Alamat Persusahaan;
- c. Email Perusahaan;

2. Surat Penyampaian Akun Aplikasi SISKOPI

Surat Penyampaian Akun SISKOPI ditandatangani oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama yang memuat Email dan Password akun aplikasi SISKOPI.

3. Surat Permohonan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pemohon membuat surat permohonan penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditandatangani oleh pemohon/penerima kuasa (Format pada lampiran 2), dengan mencantumkan :

- a. Alamat lokasi yang dimohonkan;
- b. Koordinat Lokasi dengan ketentuan:
 - 1) Koordinat geografis WGS '84
 - 2) Satuan derajat, menit dan detik
 - 3) Ketelitian 2 angka dibelakang koma
- c. Elevasi tanah lokasi, dalam satuan meter, MSL (*Mean Sea Level*) atau AGL (*Above Ground Level*);
- d. *Contact person* dan no telepon.

Serta melampirkan berkas persyaratan lainnya, antara lain :

- 1) Fotocopy KTP pemilik tanah/pemohon 1 lembar;
- 2) Fotocopy surat kepemilikan tanah, berupa sertifikat tanah dari BPN yang dilegalisir atau kartu kapling dari Pemerintah Daerah/Pusat (yang dilegalisir Pemerintah Kotamadya/Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling atau bukti penguasaan lahan (sewa);

- 3) Gambar rencana ketinggian dan denah lokasi yang dimohon;
- 4) Surat Kuasa pengurusan dari Pemilik / Pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik / pemohon);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 7) Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (Lampiran 3);
- 8) Surat persetujuan dari instansi terkait/Komandan Pangkalan (untuk bandar udara yang digunakan bersama penerbangan sipil dan penerbangan militer).

4. Persetujuan Komandan Pangkalan

Persetujuan Komandan Pangkalan diperlukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, berlaku untuk bandar udara yang digunakan bersama penerbangan sipil dan penerbangan militer.

5. Survei Lapangan

Setelah surat permohonan penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diterima, Kantor Otoritas akan mengirimkan surat pemberitahuan survei kepada Pemohon dan Surat Perintah Tugas pelaksanaan survei. Personel Kantor Otoritas melaksanakan survei lapangan ke lokasi untuk pengambilan data dengan menggunakan peralatan survei, dan mengisi Berita Acara Pengukuran Lokasi serta membuat dokumentasi.

6. Berita Acara Pengukuran Lokasi

Setelah pelaksanaan survei lapangan kemudian dibuat Berita Acara survei yang memuat data pemohon dan data hasil pengukuran.

7. Kajian KKOP.

Dari data-data hasil survei lapangan dibuat kajian KKOP sesuai dengan peraturan terkait KKOP Bandar Udara.

Format kajian KKOP memuat antara lain:

- a. Referensi;
 - b. Dasar Hukum.
 - c. Pengumpulan Data, terdiri dari:
 - 1) Data Runway/Landas Pacu Bandar Udara
 - 2) Alat Bantu Navigasi dan Komunikasi Penerbangan Bandar Udara
 - 3) Lokasi Bangunan yang diajukan
 - d. Analisis Teknis, terdiri dari:
 - 1) Analisis Teknis Terhadap Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
 - 2) Analisis Teknis Terhadap Alat Bantu Navigasi Dan Telekomunikasi Penerbangan (NDB, DVOR/DME, RADAR, ILS, dan LOCATOR).
 - e. Kesimpulan berisi Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ketinggian gedung/bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dapat diperkenankan apabila ketinggian gedung/bangunan yang dimohonkan lebih rendah atau sama dengan hasil kajian. Apabila hasil kajian lebih tinggi dari yang dimohonkan dalam surat permohonan, maka Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang diperkenankan adalah ketinggian gedung/bangunan sesuai dengan permohonan.
 - 2) Permohonan tidak dapat diperkenankan apabila ketinggian gedung/bangunan yang dimohonkan lebih tinggi dari hasil kajian. Apabila hasil kajian lebih rendah dari yang dimohonkan dalam surat permohonan, maka Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang diperkenankan adalah ketinggian gedung/bangunan yang sesuai dengan hasil kajian.
-

- 3) Pada kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama tidak diperkenankan mendirikan gedung/bangunan, kecuali bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi.
- 4) Untuk peralatan navigasi dan komunikasi penerbangan menggunakan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas.
- 5) Satuan ukur ketinggian gedung/bangunan dibuat dalam satu AGL (*Above Ground Level*), MSL (*Mean Sea Level*), dan AES (*Aerodrome Elevation System*).

8. Kondisi Bangunan yang Sudah Berdiri

Dalam kondisi tertentu apabila Bangunan sudah terbangun dan dari hasil kajian teknis ternyata melebihi batas ketinggian KKOP maka proses permohonan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dihentikan (evaluasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah), sedangkan untuk bangunan yang masih di bawah batas ketinggian KKOP dapat diterbitkan surat Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

9. Penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Surat Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ditandatangani oleh Kepala Kantor yang memuat :

- a. Alamat lokasi
 - b. Koordinat Geografis
 - c. Letak pada daerah KKOP
 - d. Jarak terhadap Ujung Runway atau Permukaan Utama/*Centre Line* R/W
 - e. Hasil Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
 - f. Ketentuan yang diatur dalam SNI KKOP Nomor 03-7112-2005 pada bagian 8.4 dan SNI Pemberian Tanda Dan Pemasangan Lampu Halangan (*Obstacle Light*) Di Sekitar Bandar Udara.
-

10. Pembayaran PNB

Setelah surat Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) disetujui oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, maka diterbitkan kode billing pembayaran PNB melalui Aplikasi SISKOP.

11. Penyerahan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Surat Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diserahkan kepada pemohon, setelah mengunggah bukti pembayaran PNB melalui Aplikasi SISKOP.

KOP SURAT/PERUSAHAAN

Nomor : (tempat), (tanggal (bulan)
(tahun)
Klasifikasi :
Lampiran :
hal : Permohonan Akun SISKOPI

K e p a d a
Yth. **Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I
Kelas Utama**

di

TANGERANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Instansi/Perusahaan :
Alamat Instansi :
No. Telp :
Email resmi/official :

Dengan ini mengajukan permohonan Akun SISKOPI guna proses penerbitan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(INSTANSI/PERUSAHAAN)

(TANDA TANGAN)

NAMA
JABATAN

KOP SURAT/PERUSAHAAN

Nomor : (tempat), (tanggal (bulan) (tahun))
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Izin Ketinggian Gedung/Bangunan
Di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I
Kelas Utama

Di

TANGERANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Instansi/Perusahaan :
Alamat Instansi :
No. Telp :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dengan data sebagai berikut :

1. Jenis Bangunan :
2. Nama Lokasi :
3. Alamat Lokasi :
4. Koordinat Lokasi :°'" S /°'" E
5. Elevasi Tanah Lokasi : ... Meter (MSL atau AGL, jika ada)
6. Tinggi Rencana : Meter
7. Contact Person dan No.Telp : ...

Sebagai persyaratan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) berikut dilampirkan :

1. Fotocopy KTP pemilik tanah/pemohon;
2. Fotocopy surat kepemilikan tanah atau kartu kapling dari Pemerintah Daerah/Pusat atau Bukti penguasaan lahan (sewa);
3. Peta/denah lokasi yang dimohonkan;
4. Gambar rencana ketinggian (jika ada);
5. Surat kuasa pengurusan dari pemilik/pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon).
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Nomor Induk Berusaha (NIB).
8. Persetujuan dari Komandan Pangkalan (untuk bandar udara yang digunakan bersama penerbangan sipil dan militer).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(INSTANSI/PERUSAHAAN)

(TANDA TANGAN)

NAMA

(JABATAN)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Instansi/Perusahaan :
Alamat Instansi :
Email/ No Telp :
Alamat Lokasi Permohonan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua data dan dokumen yang saya lampirkan untuk peroses permohonan Izin Ketinggian Gedung/Bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah asli/benar, antara lain :

- 1. KTP pemilik tanah/pemohon;
- 2. Surat kepemilikan tanah atau Bukti penguasaan lahan (sewa);
- 3. Peta/denah lokasi yang dimohonkan;
- 4. Gambar rencana ketinggian (jika ada);
- 5. Surat kuasa pengurusan dari pemilik/pemohon kepada yang mengurus (bila pengurusan oleh bukan pemilik/pemohon).
- 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 7. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 8. Persetujuan dari Komandan Pangkalan (untuk bandar udara yang digunakan berama penerbangan sipil dan militer).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi hokum sesuai peraturan yang berlaku.

(tempat), (tanggal (bulan) (tahun)
(INSTANSI/PERUSAHAAN)

(TANDA TANGAN)



NAMA
(JABATAN)